

Kebijakan Pemangkasan Anggaran di Indonesia: Efisiensi Fiskal dan Kepentingan Politik

Yumri Agelvi Sapay², Fadil Mas'ud², Gita Larasti Pandu³, Angelina Seran Nuak⁴, Elisabeth Yohana Indah⁵, Selviana Lipat Ara Kian⁶,

^{1 s.d 6}Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur, Indonesia
Email: yumrysapay@gmail.com

Abstrak

Pemangkasan anggaran sering di klaim sebagai bagian dari strategi efisiensi fiskal. Kebijakan pemangkasan anggaran dalam pemerintahan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan efisiensi fiskal dan mengalokasikan anggaran untuk program prioritas, namun seringkali di pengaruhi oleh kepentingan politik. Pemangkasan anggaran yang tidak merata dapat menimbulkan pertanyaan tentang dasar kebijakan, dan dampaknya paling besar di rasakan oleh masyarakat yang bergantung pada program pemerintah. Pemangkasan anggaran merupakan kebijakan yang kompleks dan memiliki dampak yang beragam. Efisiensi anggaran pemerintah pada 2025 mencakup pemangkasan belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,1 triliun serta pemotongan transfer ke daerah senilai Rp 50,59 triliun, sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S- 37/MK.02/2025. Efisiensi anggaran 2025 didukung oleh beberapa faktor, yaitu untuk membayar hutang luar negeri yang jatuh tempo, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyerap anggaran besar, dan sistem kerja fleksibel yang diterapkan di beberapa kementerian dan lembaga. Manfaat efisiensi anggaran menghindari pemborosan, menjamin setiap pengeluaran memberikan hasil yang optimal, memastikan sumber daya keuangan digunakan secara maksimal, meningkatkan efektivitas penggunaan dana, mendukung kesejahteraan bersama. Efisiensi anggaran dihitung dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Agar efisiensi anggaran tetap mendukung pertumbuhan, pendekatan berbasis produktivitas harus menjadi prioritas.

Kata Kunci: Kebijakan, Efisiensi Fiskal, Kepentingan Politik

Pendahuluan

Pemangkasan anggaran sering di klaim sebagai bagian dari strategi efisiensi fiskal. Kebijakan pemangkasan anggaran dalam pemerintahan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan efisiensi fiskal dan mengalokasikan anggaran untuk program prioritas, namun seringkali di pengaruhi oleh kepentingan politik. Pemangkasan anggaran yang tidak merata dapat menimbulkan pertanyaan tentang dasar kebijakan, dan dampaknya paling besar di rasakan oleh masyarakat yang bergantung pada program pemerintah. Pemangkasan anggaran merupakan kebijakan yang



kompleks dan memiliki dampak yang beragam. Efisiensi fiskal dan kepentingan politik saling berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan, sehingga penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan berbagai faktor dan memastikan bahwa kebijakan ini berjalan dengan adil dan berkelanjutan. Kebijakan efisiensi anggaran bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang tersedia agar lebih efektif dan tepat sasaran dalam mendukung program pembangunan daerah, (Nurafni et al., 2024)

Efisiensi anggaran adalah salah satu cara untuk memanfaatkan sumber daya finansial serendah mungkin tanpa menurunkan kualitas kinerja suatu organisasi. Sementara itu, dalam konteks pengelolaan negara, pemerintah melakukan efisiensi anggaran untuk menyesuaikan penggunaan dana secara tepat. Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 2025 menggarisbawahi kebijakan efisiensi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna memastikan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran. Inpres ini menginstruksikan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk melakukan review dan penghematan anggaran sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing, dengan total efisiensi sebesar Rp306,7 triliun, yang mencakup belanja kementerian/lembaga dan transfer ke daerah. Langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas fiskal, meningkatkan transparansi, serta mengalokasikan dana secara optimal bagi pembangunan prioritas nasional (Inpres, 2025).

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto berdampak langsung pada pola kerja serta sarana pendukung di berbagai kementerian dan lembaga. Tidak hanya berdampak pada pola kerja di kementerian dan lembaga, kebijakan efisiensi ini juga menimbulkan konsekuensi yang lebih luas, termasuk pada kesejahteraan pegawai negeri dan stabilitas ekonomi. Penghapusan gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) bagi PNS, serta pemutusan hubungan kerja bagi pegawai honorer non-PNS, berpotensi menimbulkan gejolak sosial dan ekonomi yang lebih serius. Pemangkasan anggaran yang dilakukan secara agresif tanpa strategi yang matang dapat mengguncang perekonomian nasional, mengingat belanja pemerintah merupakan pendorong utama pertumbuhan, terutama di sektor

konsumsi dan investasi. Jika daya beli masyarakat menurun drastis dan aktivitas usaha melemah, angka pengangguran berisiko meningkat, yang pada akhirnya menyeret sektor ritel, UMKM, dan industri manufaktur ke dalam perlambatan ekonomi yang lebih dalam. Selain itu, kebijakan ini juga dapat berdampak pada kepercayaan investor. Ketidakpastian ekonomi akibat pemotongan belanja negara yang berlebihan bisa membuat investor asing berpikir ulang sebelum menanamkan modal sehingga meningkatkan risiko perlambatan investasi dan potensi resesi.

Kebijakan efisiensi anggaran juga berpengaruh pada efektivitas pelayanan publik di setiap daerah. Pemangkasan anggaran dalam sektor pendidikan dan kesehatan, misalnya, dapat mengurangi akses masyarakat terhadap layanan yang berkualitas. Jika anggaran pendidikan dikurangi, maka kemungkinan besar alokasi untuk beasiswa, peningkatan sarana dan prasarana sekolah, serta pelatihan guru juga akan berkurang, yang dapat berakibat pada menurunnya kualitas pendidikan di daerah tersebut. Begitu pula dalam sektor kesehatan, jika alokasi anggaran untuk program kesehatan dikurangi, maka pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk penyediaan obat-obatan dan fasilitas kesehatan, bisa mengalami kendala. Efisiensi anggaran seharusnya tidak hanya berfokus pada pengurangan belanja, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak maksimal terhadap kesejahteraan masyarakat, (Sonny, 2012)

Kebijakan efisiensi anggaran tentu mempengaruhi aspek perencanaan dan pengelolaan program pembangunan. Dengan adanya tekanan untuk menghemat anggaran, pemerintah daerah harus lebih inovatif dalam mencari sumber pendanaan alternatif, seperti melalui skema kerja sama dengan pihak swasta atau pemanfaatan dana hibah dari pemerintah pusat maupun lembaga donor. Penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan anggaran menjadi semakin penting agar tidak terjadi kebocoran atau penyalahgunaan dana yang dapat merugikan daerah. Transparansi dalam perencanaan dan eksekusi anggaran juga menjadi faktor kunci untuk memastikan bahwa kebijakan efisiensi yang diterapkan benar-benar berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan kepentingan public. Keterbatasan anggaran dapat menyebabkan beberapa proyek mengalami penundaan atau

bahkan dibatalkan, terutama jika program tersebut tidak dianggap sebagai prioritas utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Misalnya, proyek pembangunan infrastruktur yang seharusnya mendukung konektivitas wilayah dapat mengalami keterlambatan akibat keterbatasan anggaran, yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal dan mobilitas masyarakat (Gunawan, 2018).

Agar efisiensi anggaran tetap mendukung pertumbuhan, pendekatan berbasis produktivitas harus menjadi prioritas. Dengan kata lain, keberhasilan efisiensi anggaran sangat bergantung pada sejauh mana kebijakan ini dapat meningkatkan efisiensi investasi (kapital), kualitas tenaga kerja (labor), dan penggunaan teknologi yang tepat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Efisiensi anggaran yang diterapkan harus disertai dengan strategi yang tidak hanya menekan belanja, tetapi juga mempercepat reformasi regulasi, digitalisasi ekonomi, dan penguatan infrastruktur pendukung industri, termasuk menurunkan biaya logistik yang selama ini menjadi hambatan besar dalam daya saing nasional. Kebijakan fiskal merupakan salah satu aspek krusial dari kebijakan publik yang memainkan peran penting dalam pengelolaan ekonomi suatu negara. Secara umum, kebijakan fiskal mencakup pengaturan pendapatan dan belanja negara, yang menjadi alat utama pemerintah untuk mempengaruhi kondisi perekonomian. Kebijakan ini melibatkan keputusan mengenai bagaimana pemerintah memperoleh pendapatan, biasanya melalui pajak, dan bagaimana pengeluaran tersebut dialokasikan untuk berbagai kebutuhan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai dokumen resmi pemerintah, peraturan perundang-undangan, laporan anggaran, serta literatur akademik yang relevan (Wijaya et al., 2025). Penelitian ini juga menganalisis wacana publik dan pandangan para ahli melalui artikel ilmiah dan media massa untuk memahami dinamika pemangkasan anggaran dalam

sistem pemerintahan Indonesia. Analisis dilakukan dengan menelusuri keterkaitan antara langkah efisiensi fiskal yang diambil pemerintah dan kemungkinan muatan kepentingan politik di balik kebijakan tersebut, guna memperoleh pemahaman yang objektif terhadap implikasi kebijakan pemangkasan anggaran dalam konteks tata kelola pemerintahan.

Pembahasan

A. Kebijakan Fiskal Terhadap Pemangkasan Anggaran Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Kebijakan fiskal merupakan salah satu aspek krusial dari kebijakan publik yang memainkan peran penting dalam pengelolaan ekonomi suatu negara. Secara umum, kebijakan fiskal mencakup pengaturan pendapatan dan belanja negara, yang menjadi alat utama pemerintah untuk mempengaruhi kondisi perekonomian. Kebijakan ini melibatkan keputusan mengenai bagaimana pemerintah memperoleh pendapatan, biasanya melalui pajak, dan bagaimana pengeluaran tersebut dialokasikan untuk berbagai kebutuhan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Hafizd, JZ, Janwari, Y., & Al-Hakim, S. (2024). Kebijakan Fiskal di Indonesia: Analisis Hukum Keadilan Ekonomi dan Implikasinya terhadap Pembangunan Berkelanjutan. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Ekonomi dan Hukum Syariah* , 3 (2), 146-167.

Kebijakan fiskal dirancang untuk mengatur dan menyesuaikan pendapatan serta pengeluaran pemerintah dengan tujuan utama memperbaiki dan memelihara stabilitas perekonomian. Ini termasuk penetapan anggaran negara, pengaturan tarif pajak, serta keputusan mengenai alokasi belanja untuk sektor-sektor yang dianggap prioritas. Berbeda dengan kebijakan moneter, yang fokus utamanya adalah mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dan mempengaruhi suku bunga untuk mengendalikan inflasi serta merangsang pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal lebih berfokus pada aspek pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal adalah kebijakan serta peran pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai kesejahteraan ekonomi suatu negara yang mencakup:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b. Dana Alokasi Umum (DAU)
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
- d. Belanja Daerah

B. Kepentingan Politik Mempengaruhi Kebijakan Pemangkasan Anggaran Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Efisiensi anggaran merupakan salah satu strategi utama yang diusung Presiden Prabowo Subianto dalam mengelola keuangan negara. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan efisiensi anggaran, pemerintah dapat mengalokasikan dana secara lebih strategis ke sektor-sektor prioritas seperti pertahanan, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan. Namun, di balik manfaat ekonomi yang ditawarkan, muncul potensi dampak politik yang tidak bisa diabaikan. Penghematan yang dilakukan dalam satu sektor sering kali menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, baik dari kalangan birokrasi, aktor politik, maupun masyarakat luas. Jika tidak dikelola dengan baik, efisiensi anggaran yang dimaksudkan untuk memperkuat stabilitas ekonomi justru bisa berujung pada defisiensi politik yang melemahkan pemerintahan.

1. Rasionalitas Efisiensi Anggaran

Sri Mulyani mengatakan efisiensi anggaran sebesar Rp 306,7 triliun dilakukan pemerintah dalam APBN 2025. Dana hasil efisiensi itu dialihkan untuk mendukung program prioritas pemerintah, seperti program Makan Bergizi Gratis...” (CNN Indonesia, 2025). Program ini telah menerima alokasi awal sebesar Rp 71 triliun untuk menjangkau 19,47 juta penerima manfaat, dan diharapkan cakupannya dapat diperluas hingga 82,9 juta penerima dengan tambahan anggaran Rp 100 triliun. Selain itu, efisiensi anggaran juga diarahkan untuk memperkuat sektor pertahanan dengan modernisasi alutsista dan peningkatan kesejahteraan prajurit. Sektor infrastruktur pun mendapat perhatian dengan pengembangan jalan nasional dan transportasi berbasis digital guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, pendidikan dan kesehatan memperoleh anggaran

tambahan untuk perbaikan fasilitas serta pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu. Pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor ketahanan pangan dan energi demi mengurangi ketergantungan terhadap impor serta memastikan keberlanjutan ekonomi nasional.

2. Efisiensi Anggaran sebagai Instrumen Politik

Konsep efisiensi dalam ekonomi telah lama menjadi perhatian para pemikir klasik. Adam Smith dalam *The Wealth of Nations* (1776) menekankan bahwa efisiensi dalam pembagian kerja dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi. Prinsip ini relevan dalam konteks pengelolaan anggaran negara, di mana distribusi sumber daya yang tepat dapat memaksimalkan manfaat ekonomi. Efisiensi anggaran memungkinkan pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri dan meningkatkan kemandirian fiskal. Dengan alokasi yang lebih efektif, program-program prioritas dapat lebih optimal dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, kebijakan ini dapat memperkuat kredibilitas pemerintah dengan menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan keuangan yang bersih dan transparan. Lebih jauh, pengurangan pemborosan dalam belanja negara juga berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah inflasi yang tidak terkendali, (Zainul Bahri, S. E., Aprilianti, D. V., & SSTP, M :2023)

3. Defisiensi Politik sebagai Resiko Efisiensi Anggaran

Max Weber, dalam karyanya *Economy and Society*, mengembangkan konsep birokrasi sebagai bentuk organisasi yang paling rasional dan efisien untuk mengelola sumber daya dalam masyarakat modern. Namun, ia juga mengakui bahwa birokrasi dapat menimbulkan resistensi terhadap perubahan, terutama ketika terjadi penyesuaian dalam struktur anggaran. Weber menjelaskan bahwa birokrasi memiliki kecenderungan untuk mempertahankan status quo karena struktur hierarkis dan aturan yang ketat. Perubahan dalam alokasi anggaran atau pemangkasan dana dapat memicu ketidakpuasan dari aktor politik, termasuk parlemen dan partai koalisi, serta birokrat yang terbiasa dengan pola anggaran tertentu. Hal ini dapat dianggap sebagai ancaman terhadap kepentingan politik atau institusional mereka. Selain itu, Weber memperkenalkan konsep "kandang

besi" (iron cage) untuk menggambarkan bagaimana rasionalisasi dan birokratisasi dapat membatasi kebebasan individu dan fleksibilitas organisasi. Dalam konteks ini, birokrasi yang terlalu kaku dapat menghambat inovasi dan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan masyarakat (Weber, M :2015).

Meski memiliki berbagai manfaat, efisiensi anggaran tidak bisa dilepaskan dari potensi dampak politik yang mengikutinya. Max Weber dalam *Economy and Society* (1922) menjelaskan bahwa birokrasi yang rasional dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya, tetapi pada waktu bersamaan, perubahan dalam struktur anggaran dapat menimbulkan resistensi. Pemangkasan anggaran atau pengalihan dana dari sektor tertentu dapat memicu ketidakpuasan dari berbagai aktor politik, termasuk parlemen dan partai koalisi. Jika tidak ada pendekatan komunikasi yang baik, kebijakan ini bisa dianggap sebagai ancaman bagi kepentingan politik mereka. Di sisi lain, birokrat yang sudah terbiasa dengan pola anggaran tertentu cenderung menolak perubahan yang dapat mengurangi sumber daya bagi instansi mereka, (Solikin, A 2023).

Akibatnya, implementasi kebijakan efisiensi dapat terhambat jika tidak diimbangi dengan strategi mitigasi yang tepat. Dampak lain yang perlu diperhatikan adalah potensi turbulensi sosial yang muncul akibat pengurangan anggaran di sektor tertentu. Jika efisiensi anggaran menyebabkan pemangkasan subsidi atau bantuan sosial, maka reaksi negatif dari masyarakat bisa tidak terhindarkan. Rakyat yang merasa dirugikan oleh kebijakan ini bisa kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah, yang dalam jangka panjang dapat berujung pada ketidakstabilan politik. Jika pemerintah pusat juga mengurangi transfer dana ke daerah, hal ini bisa memperburuk hubungan antara pusat dan daerah, memicu ketegangan politik yang lebih luas. Dalam kondisi ekstrem, ketidakpuasan publik dapat dimanfaatkan oleh kelompok oposisi untuk melemahkan legitimasi pemerintahan. Kritik terhadap efisiensi anggaran dapat dijadikan alat politik untuk menyerang kebijakan pemerintah, menciptakan narasi bahwa efisiensi yang dilakukan bukan

untuk kepentingan rakyat, melainkan hanya untuk menekan pengeluaran tanpa mempertimbangkan dampak sosialnya.

4. Strategi Mitigasi untuk Menghindari Defisiensi Politik

Untuk menghindari risiko defisiensi politik akibat kebijakan efisiensi anggaran, strategi mitigasi yang komprehensif perlu diterapkan:

- a. Komunikasi publik yang efektif harus menjadi prioritas. Pemerintah harus secara transparan menjelaskan alasan dan manfaat dari kebijakan ini kepada masyarakat, bukan hanya kepada kalangan birokrasi. Kejelasan dalam penyampaian informasi dapat mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan dukungan publik terhadap kebijakan yang diambil, (Nawi, H.R:2017)
- b. Mitigasi sosial perlu dilakukan dengan mengalokasikan dana kompensasi bagi sektor-sektor yang terdampak. Dengan demikian, masyarakat tetap dapat merasakan manfaat dari efisiensi anggaran, bukan justru merasa kehilangan hak-hak ekonomi mereka, (Yusuf, A., Rizani, A., Fitri, R., Pamungkas, K. N. P., Saputra, W. A., & Shaddiq, S :2024).
- c. Membangun konsensus politik menjadi langkah penting dalam memastikan stabilitas pemerintahan. Keterlibatan berbagai aktor politik dalam perumusan kebijakan dapat mengurangi resistensi dan memperkuat dukungan terhadap langkah-langkah efisiensi. Jika parlemen dan partai koalisi merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan, mereka cenderung memberikan dukungan yang lebih kuat, (Deni, H. A., MM, C., Asiyah, S. A., Sopian, S. H., Waruwu, Y., Funco Tanipu, S. T., ... & Nugroho, C. A:2024).
- d. Kebijakan efisiensi harus bersifat fleksibel dan dievaluasi secara berkala. Jika dampak negatif mulai terlihat, pemerintah harus siap melakukan penyesuaian agar tidak terjadi instabilitas politik yang lebih besar. Adaptasi terhadap kondisi yang berkembang akan memastikan bahwa efisiensi anggaran tetap memberi manfaat ekonomi tanpa menimbulkan dampak politik yang merugikan. Kebijakan fiskal harus dirancang adaptif dan responsif terhadap dinamika ekonomi dan sosial. Evaluasi berkala terhadap kebijakan pengeluaran dan pendapatan perlu

dilakukan untuk memastikan efektivitasnya serta mencegah dampak politik dan sosial yang tidak diinginkan.” (Kementerian Keuangan RI, 2024)

- e. Pemanfaatan teknologi juga menjadi elemen krusial dalam mendukung efektivitas kebijakan anggaran. Sistem pengelolaan keuangan berbasis teknologi memungkinkan transparansi yang lebih baik, sehingga masyarakat dapat mengawasi bagaimana anggaran digunakan. Dengan digitalisasi, setiap rupiah yang dihemat dapat dipastikan dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara nyata. Langkah ini bukan hanya akan meningkatkan efisiensi anggaran, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, (Yusman, Y., Putra, R. R., & Sinaga, I:2024).
- f. Jadi, Efisiensi anggaran adalah kebijakan yang berpotensi memberikan manfaat besar bagi perekonomian nasional, tetapi juga memiliki risiko politik yang perlu diantisipasi. Keberhasilannya bergantung pada bagaimana pemerintah mengelola komunikasi, membangun konsensus politik, serta menjaga keseimbangan antara penghematan dan kesejahteraan masyarakat. Jika strategi mitigasi dijalankan dengan baik, efisiensi anggaran dapat menjadi instrumen utama dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, kuat, dan berkelanjutan. Namun, jika tidak dikelola dengan cermat, efisiensi yang dimaksudkan untuk memperkuat ekonomi justru bisa berujung pada defisiensi politik yang mengancam stabilitas pemerintahan.

5. Urgensi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara yang tercantum dalam UUD 1945, seperti melindungi bangsa, meningkatkan kesejahteraan, dan mencerdaskan kehidupan. Untuk itu, pemerintah merancang program-program dengan hasil terukur. Namun, efisiensi anggaran sering menghadapi tantangan, seperti keterbatasan dana untuk sektor prioritas dan pemotongan anggaran yang dapat mempengaruhi proyek strategis. Kebijakan efisiensi yang diinstruksikan Presiden meliputi pengurangan belanja perjalanan dinas, pembatasan kegiatan seremonial, dan fokus

anggaran pada pelayanan publik. Pada 2025, pemerintah memangkas anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp256,1 triliun, serta transfer ke daerah Rp50,59 triliun. Efisiensi anggaran bertujuan menghindari pemborosan dan memastikan pengeluaran yang optimal. Agar mendukung pertumbuhan, efisiensi harus berbasis produktivitas, meningkatkan investasi, kualitas tenaga kerja, dan pemanfaatan teknologi yang tepat. Selain itu, strategi efisiensi juga harus diikuti dengan reformasi regulasi dan penguatan infrastruktur.

6. Dampak Efisiensi Anggaran Terhadap Kementerian dan Lembaga

a. Penerapan *Work From Anywhere* (WFA)

Efisiensi anggaran 2025 mendorong Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menerapkan skema kerja *Work From Anywhere* (WFA). Pegawai BKN bekerja 2-3 hari di kantor tanpa jam kerja fleksibel, memaksimalkan koordinasi daring, dan membatasi perjalanan dinas. Kemenkes menerapkan WFA setiap Rabu dan mengurangi biaya operasional, seperti pembelian kebutuhan kantor, penataan keindahan, serta penggunaan sarana dan kendaraan kantor. Langkah ini dilakukan untuk menekan pengeluaran tanpa mengurangi produktivitas, (Hartono, H : 2025).

b. Menurunnya Kualitas Layanan Kebencanaan BMKG

Dampak lain terlihat pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang mengalami pemotongan anggaran 50,35 persen dari Rp 2,826 triliun menjadi Rp 1,423 triliun. Pemangkasan ini mengancam operasional Alat Operasional Utama (Aloptama) yang kemampuannya menurun hingga 71 persen akibat keterbatasan biaya pemeliharaan. Hal ini mengakibatkan penurunan kualitas layanan kebencanaan yang berpotensi mempengaruhi keselamatan publik.

c. Pengurangan Tenaga Lepas di RRI

Radio Republik Indonesia (RRI) menghadapi pengurangan karyawan berstatus tenaga lepas, seperti kontributor dan penyiar. Mereka kini digaji berdasarkan durasi kerja atau proyek yang diikuti. Pengurangan ini dilakukan karena biaya operasional untuk tenaga lepas harus

ditekan. Selain itu, RRI melakukan seleksi ulang karyawan berdasarkan kompetensi dan performa untuk mempertahankan efisiensi anggaran.

d. Pembatalan Proyek Fisik Kemen PU

Efisiensi anggaran juga mempengaruhi Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU), yang hanya menerima Rp 29,57 triliun dari alokasi awal Rp 110,95 triliun. Akibatnya, beberapa proyek fisik dibatalkan, termasuk pembangunan jalan tol sepanjang 7,36 km dan perbaikan rutin jalan nasional sepanjang 47.603 km. Dana tanggap darurat juga dipangkas, sehingga mengurangi kemampuan Kemen PU dalam menghadapi bencana dan keadaan darurat lainnya.

e. Terganggunya Gaji dan Tunjangan di Mahkamah Konstitusi

Di Mahkamah Konstitusi (MK), pemotongan anggaran dari Rp 611,47 miliar menjadi Rp 385,3 miliar berdampak pada gaji dan tunjangan yang hanya dapat dibayarkan hingga Mei 2025. Selain itu, anggaran untuk penanganan perkara sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Kada) dan pengujian undang-undang tidak mencukupi, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu proses peradilan yang adil dan tepat waktu.

f. Terhentinya Seleksi Hakim Agung di Komisi Yudisial

Komisi Yudisial (KY) juga merasakan dampak serupa dengan efisiensi anggaran 2025 hingga 54,35 persen. Imbasnya, seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc Mahkamah Agung (MA) terhenti karena anggaran operasional harian tidak mencukupi. Kekosongan 19 posisi hakim agung dan hakim ad hoc pun terancam tidak terisi, yang dapat memperlambat proses peradilan di Indonesia.

g. Terhambatnya Inovasi dan Riset di BRIN dan Kemdikti Saintek

Efisiensi anggaran turut mempengaruhi anggaran riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang dipangkas Rp 2,07 triliun. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdikti Saintek) juga mengalami pengurangan anggaran riset, meski alokasinya sudah tergolong minim. Pemotongan ini dikhawatirkan akan menghambat inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Kesimpulan

Pemangkasan anggaran sering di klaim sebagai bagian dari strategi efisiensi fiskal. Kebijakan pemangkasan anggaran dalam pemerintahan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan efisiensi fiskal dan mengalokasikan anggaran untuk program prioritas, namun seringkali di pengaruhi oleh kepentingan politik. Pemangkasan anggaran yang tidak merata dapat menimbulkan pertanyaan tentang dasar kebijakan, dan dampaknya paling besar di rasakan oleh masyarakat yang bergantung pada program pemerintah. Pemangkasan anggaran merupakan kebijakan yang kompleks dan memiliki dampak yang beragam. Efisiensi anggaran adalah salah satu cara untuk memanfaatkan sumber daya finansial serendah mungkin tanpa menurunkan kualitas kinerja suatu organisasi. Kebijakan efisiensi anggaran juga berpengaruh pada efektivitas pelayanan publik di setiap daerah. Pemangkasan anggaran dalam sektor pendidikan dan kesehatan, misalnya, dapat mengurangi akses masyarakat terhadap layanan yang berkualitas. Kebijakan efisiensi anggaran tentu mempengaruhi aspek perencanaan dan pengelolaan program pembangunan. Dengan adanya tekanan untuk menghemat anggaran, pemerintah daerah harus lebih inovatif dalam mencari sumber pendanaan alternatif, seperti melalui skema kerja sama dengan pihak swasta atau pemanfaatan dana hibah dari pemerintah pusat maupun lembaga donor. Penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan anggaran menjadi semakin penting agar tidak terjadi kebocoran atau penyalahgunaan dana yang dapat merugikan daerah. Agar efisiensi anggaran tetap mendukung pertumbuhan, pendekatan berbasis produktivitas harus menjadi prioritas. Kebijakan fiskal mencakup pengaturan pendapatan dan belanja negara, yang menjadi alat utama pemerintah untuk mempengaruhi kondisi perekonomian. Kebijakan ini melibatkan keputusan mengenai bagaimana pemerintah memperoleh pendapatan, biasanya melalui pajak, dan bagaimana pengeluaran tersebut dialokasikan untuk berbagai kebutuhan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Referensi

- Anggaran*. Di akses pada: <https://www.tempo.co/politik/tahan-panas-hingga-kerja-nomaden-pegawai>
- Anggraini, F., & Yuniseffendri, Y. Ujaran Desideratif Pada Siaran Langsung “3 Bacapres Bicara Gagasan” Dalam Gelar Wicara Kanal Youtube Mata Najwa: Kajian Pragmatik.
- CNN Indonesia. (2025, Januari 24). ‘Diet Ketat’ APBN Rp306 T, Sri Mulyani Singgung Makan Bergizi Gratis. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250124110226-532-1190995>
- Deni, H. A., MM, C., Asiyah, S. A., Sopian, S. H., Waruwu, Y., Funco Tanipu, S. T., ... & Nugroho, C. A. (2024). Pengantar ilmu politik. Cendikia Mulia Mandiri.
- Fahrizal, M., & Bintoro, Y. J. (2022). DESENTRALISASI FISKAL DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. *Jurnal Manajemen Kewirausahaan*, 19(1), 73.
- Hafizd, JZ, Janwari, Y., & Al-Hakim, S. (2024). Kebijakan Fiskal di Indonesia: Analisis Hukum Keadilan Ekonomi dan Implikasinya terhadap Pembangunan Berkelanjutan. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Ekonomi dan Hukum Syariah*, 3 (2), 146-167.
- Hakim, L. (2016). Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1).
- Hartono, H. (2025). Urgensi Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2025 terhadap pelaksanaan APBN di Kementerian/Lembaga Tahun 2025. *Indonesian Research Journal on Education*, 5(1), 2666-2672.
- Hartono, H. (2025). Urgensi Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2025 terhadap pelaksanaan APBN di Kementerian/Lembaga Tahun 2025. *Indonesian Research Journal on Education*, 5(1), 2666-2672.
- Intruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2025 tentang Efisiensi Beianja dalam Peiaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Iskandar, A., & Subekan, A. (2014). Kinerja Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat di Era Desentralisasi Fiskal (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan TA 2008-2012)(Local

Financial Performance and The Social Welfare on Districts and Municipals of South Sulawesi on 2008-2012: Panel Regression with Random Effect Model (REM)). *Jurnal Info Artha Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Vol. I/XII/2014-ISSN, 0852-6737.*

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025: Kebijakan Fiskal untuk Mendorong Transformasi Ekonomi. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id>

kementerian-imbas-efisiensi-anggaran-1204841

Kompas.id. (2025, 2 Februari). Kebijakan Efisiensi Anggaran Perlu Pendekatan Fleksibel. Diakses dari <https://www.kompas.id>

Nawi, H. R. (2017). Perilaku Kebijakan Organisasi (Vol. 1). Sah Media.

Solikin, A. (2023). Bab 3 Kebijakan Fiskal Berkelanjutan Dalam Ekonomi Islam. *Makroekonomi Islam & Pembangunan Berkelanjutan*, 3(1), 32.

Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2025.

Tempo.co (9 Februari 2025) *Tahan Panas hingga Kerja Nomaden Pegawai Kementerian Imbas Efisiensi*

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Walizi, H., & Kom, S. (2025). Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran Terhadap Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah Di Bappeda Muara Enim. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(02 April), 1707-1718.

Weber, M (2015). Bureaucracy. Dalam T. Waters & D. Waters (Eds.), *Weber's Rationalism and Modern Society: New Translations on Politics, Bureaucracy, and Social Stratification* (hlm. 73–128). Palgrave Macmillan.

Weber, M. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. University of California Press.

Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.

- World Bank. (2022). Indonesia Public Expenditure Review: Spending for Better Results. Washington, DC: World Bank. Diakses dari <https://openknowledge.worldbank.org>
- Yusman, Y., Putra, R. R., & Sinaga, I. (2024). Penerapan Sistem Informasi untuk Meningkatkan Tata Kelola dan Pelayanan Publik di Era Digital. *Serasi Media Teknologi*.
- Yusuf, A., Rizani, A., Fitri, R., Pamungkas, K. N. P., Saputra, W. A., & Shaddiq, S. (2024). Sentimen Positif Atau Negatif: Perspektif Masyarakat Terhadap Pemindahan Ibu Kota Nusantara. *Masyarakat Indonesia*, 50(2), 277-300.
- Zainul Bahri, S. E., Aprilianti, D. V., & SSTP, M. (2023). Menuju Kesejahteraan Berkelanjutan Pemahaman Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Klasik, Neoklasik, Islam, Green Economy, dan Blue Economy. *Nas Media Pustaka*.